



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP BANTUAN
DESA DI MASA PANDEMI COVID 19**

**(Studi Kasus Di Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan
Banyuputih Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

AYU APRILIA

NPM 217.01.09.1.073



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2021

RINGKASAN

Ayu Aprilia, 2021, NPM 21701091073, Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Bantuan Desa Di Masa Pandemi Covid 19, Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.si, Dosen Pembimbing II : Dr. Sunariyanto, S.Sos.,M.M.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan Kebijakan Pemerintah Desa tentang pelaksanaan pembagian bantuan sosial yang belum merata di masa pandemi covid 19 di Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pembagian bantuan yang belum merata, Bantuan sosial sudah dibagikan secara merata atau belum, dampak yang ditimbulkan akibat bantuan yang belum merata. di Desa Kebangsaan Wonorejo. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: Kebijakan Pemerintah Desa terhadap pembagian bantuan sosial di masa pandemi covid 19 kepada masyarakat Desa Kebangsaan Wonorejo, Bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo sudah dibagikan secara merata atau belum, Dampak yang ditimbulkan dari pembagian bantuan yang tidak merata terhadap kelangsungan masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti memilih jenis kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi di lapangan secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kebijakan pemerintah desa terhadap bantuan desa kebangsaan wonorejo, Pembagian bantuan oleh pemerintah desa, Partisipasi masyarakat pada saat pembagian bantuan, Pembangunan berkelanjutan setelah adanya covid 19.

Kata Kunci : Kebijakan, Bantuan Sosial, Dampak

SUNMARRY

Ayu Aprilia, 2021, NPM 21701091073, Program Studi Adiministrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Bantuan Desa Di Masa Pandemi Covid 19, Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.si, Dosen Pembimbing II : Dr. Sunariyanto, S.Sos.,M.M.

This research is the result of a study that describes the Village Government's policy regarding the implementation of the unequal distribution of social assistance during the COVID-19 pandemic in Wonorejo Nationality Village, Banyuputih District, Situbondo Regency. The importance of this research is to find out how the village government policies in the distribution of assistance are not evenly distributed, social assistance has been distributed evenly or not, the impact caused by the uneven assistance. in the Wonorejo National Village. The purpose of this research is to find out: Village Government policies on the distribution of social assistance during the covid 19 pandemic to the Wonorejo Nationality Village community, Assistance in Wonorejo Nationality Village has been distributed evenly or not, Impacts arising from the unequal distribution of assistance on community survival .

This research method uses a descriptive qualitative approach. The researcher chose the qualitative type with the descriptive method aimed at getting a clear and real picture of what was happening in the field as a whole.

The results of this study indicate that: The village government's policy towards the assistance of the Wonorejo national village, the distribution of assistance by the village government, Community participation during the distribution of aid, Sustainable development after the covid 19.

Keywords: Policy, Social Assistance, Impact

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan menjadi sarana pemecahan atas segala masalah dan Tindakan yang terjadi, Kebijakan adalah sebagai pedoman untuk membuat keputusan komitmen dan untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Dalam hal ini Pemerintah Desa adalah instansi yang berada pada tingkat yang paling bawah, Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, hubungan hubungan sosial (Sumarnonugroho,1987:28)

Virus corona adalah sebagai wabah bencana yang sedang terjadi saat ini, yang menyerang seluruh dunia salah satunya adalah Indonesia. Wabah virus corona ini menimbulkan dampak yang signifikan salah satunya adalah dampak perekonomian, dimana perekonomian menjadi lumpuh. Beberapa dampak yang diakibatkan adanya covid 19 adalah tekanan besar yang dialami oleh perusahaan manufaktur otomotif yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi, sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, restoran dan lain-lain. Dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 semua masyarakat mengalami kerugian, Akhirnya Pemerintah mengeluarkan berbagai skema kebijakan, salah satunya

adalah kebijakan dalam pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang berdampak pandemi covid 19. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Ada beberapa bantuan yaitu Pembagian Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai), dana desa, Listrik Gratis, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji Karyawan, dan BLT usaha mikro kecil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Situbondo No.23 Tahun 2020 tentang Pedoman penyaluran bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo

Pemerintah melakukan pembagian bantuan dengan menggunakan data desa yang dikirim ke pemerintah pusat dan kemudian bantuan tersebut dibagikan ke masyarakat akibatnya bantuan tersebut tidak tepat sasaran dikarenakan data yang dimiliki oleh pusat dan daerah adalah data yang ada telah usang dan tidak relevan lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini. Bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sebelum covid 19 sekarang juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat Covid 19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi.

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang banyak salah sasaran secara langsung memberikan dampak buruk kepada kebijakan bantuan sosial itu sendiri, karena pada dasarnya bantuan sosial ini untuk membantu melindungi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak covid 19. Sehingga

Sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan sosial akan tetap kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sebaiknya pemerintah lebih memperbaiki sistem bantuan agar tetap bisa menyambung hidup dan tetap bertahan dirumah saja selama masa pandemi covid 19.

Kemiskinan dan ketimpangan distribusi dan pendapatan selalu menjadi pembicaraan yang menarik bagi Negara maju dan Negara berkembang , karena kedua perubahan tersebut hampir dialami oleh semua Negara didunia. Dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang bervariasi, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kondisi, perbedaan sosial, ekonomi dan politik di suatu Negara. Penanggulangan kemiskinan sangat penting dan mendapat perhatian karena kemiskinan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, sehingga mengakibatkan antara lain tingginya beban sosial-ekonomi, rendahnya produktivitas sumberdaya manusia, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, dan merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Pandemi Covid-19 terbentuk dari perubahan yang tidak direncanakan, di mana perubahan yang tidak direncanakan itu merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Manusia pun berharap agar wabah ini lenyap dari kehidupan secepat mungkin. Hadirnya wabah ini seakan menguasai tatanan pola kehidupan masyarakat. Sudah cukup penderitaan manusia yang dialami, bumi yang dilanda bencana-bencana yang mengerikan dan merugikan, ditambah lagi dengan munculnya virus yang sangat mematikan. Oleh karena itu, kita berharap agar pandemi ini segera berlalu. Harapan kita ialah

tatanan pola kehidupan masyarakat kembali pulih. Sehingga kita bisa menikmati kembali tatanan kehidupan sosial yang saat ini tengah terkatung-katung bersebab Corona.

Fenomena yang terjadi di Desa Kebangsaan Wonorejo ialah Kebijakan Pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yang berdampak virus covid 19 yang belum jelas. Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar terhadap pembagian bantuan yang tidak sesuai dan belum efektif..

Dalam kurung waktu lama Covid 19 melanda hampir Sebagian besar Negara di dunia. menimbulkan situasi yang gaduh serta ketidakpastian sepanjang pandemi, termasuk di Desa Kebangsaan Wonorejo sejumlah kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi dampak yang timbul akibat virus Corona, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam masa pandemi adalah penyaluran bantuan kepada terdampak Covid 19. Namun kurangnya informasi kepada masyarakat Di Desa Kebangsaan Wonorejo menyebabkan data-data warga yang seharusnya mendapat bantuan tidak tervalidasi dengan baik, misalnya data warga yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial. Hal tersebut dikarenakan pemerintah masih menggunakan data yang lama sehingga tidak tepat sasaran. (wawancara pada tanggal 28 september 2020)

Upaya pemerintah dalam penanggulangan covid 19 yaitu dengan cara memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial yang diterima masyarakat Di Desa Kebangsaan Wonorejo tidak merata. Hal tersebut dibuktikan dengan warga yang memperoleh bantuan secara acak yang hanya berupa bantuan sembako padahal

seharusnya dari pemerintah pusat ada bantuan langsung tunai yang seharusnya diterima oleh masyarakat. (wawancara pada tanggal 28 september 2020)

Hal ini didukung juga dengan adanya surat keputusan dari pemerintah provinsi yang belum turun sehingga pelaksanaan program bantuan covid 19 mengalami kendala yang cukup signifikan, oleh karena itu program bantuan terlaksana dengan efektif.

Kurangnya transparansi dari pemerintah desa dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Kebangsaan Wonorejo, pemerintah desa tidak memberikan informasi mengenai anggaran yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, konfirmasi dari Kepala Desa Kebangsaan Wonorejo tidak menyebutkan belum adanya bantuan khusus bagi yang terdampak covid 19. (wawancara pada tanggal 28 september 2020)

Evaluasi program bantuan covid 19 di Desa Kebangsaan wonorejo perlu dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir bagi yang belum mendapatkan bantuan sosial yang belum merata. (wawancara pada tanggal 28 september 2020)

Kepala Desa, Desa Kebangsaan Wonorejo mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Peraturan PSBB ini sebenarnya berdampak pada aktivitas warga didesa dikarenakan mereka harus dibatasi keluar masuk dengan jam yang telah ditentukan kepala desa. (wawancara, pada tanggal 28 september 2020)

Bantuan-bantuan desa dilakukan melalui satgas covid penanganan segala

bentuk kekurangan dan tidak keberdayaan desa disuport dari satgas kecamatan dan juga satgas kabupaten terutama adalah penyemprotan disinfektan melalui mobil watercanon , itu dilakukan pada awal desa kebangsaan wonorejo sudah terkonfirmasi positif corona dan menjadi ketat peraturan, kemudian memberikan sembako-sembako diwilayah yang terkonfirmasi tersebut dan memberikan sosialisasi supaya masyarakat bisa memahami untuk menghindari tertularnya virus corona. Akan tetapi pemberian sembako ini ternyata diberikan tidak merata kepada warga di Desa Kebangsaan Wonorejo. Dengan adanya fakta ini dilapangan menarik minat peneliti untuk melihat dan memperhatikan kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan selama Covid-19 kepada masyarakat di Desa Kebangsaan Wonorejo.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP BANTUAN DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Kebangsaan Wonorejo Kec.Banyuputih Kab.Situbondo)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa dalam Memberikan Bantuan kepada warga di Desa Kebangsaan Wonorejo pada saat covid 19?
2. Mengapa bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo belum dibagikan secara merata dari Desa untuk warga pada massa pandemi covid 19?
3. Apakah dampak yang ditimbulkan dari pembagian bantuan yang tidak merata terhadap kelangsungan masyarakat di Desa Kebangsaan Wonorejo?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Bantuan Desa di Masa Pandemi COVID 19;
2. Untuk mengetahui bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo sudah dibagikan secara merata atau belum;
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembagian bantuan yang tidak merata terhadap kelangsungan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Dalam hal ini yaitu Kepala Desa dalam mengoptimalkan Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Bantuan Desa Di Masa Pandemi Covid 19.
2. Secara teoritis penelitian ini dapat dapat memberikan kontribusi pemikiran, khususnya dalam kajian Ilmu Administrasi Publik mengenai Kebijakan Pemerintah Desa khususnya dalam Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
3. Serta mampu memberikan gambaran strategi kepada Pemerintah Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuptuih Kabupaten Situbondo khususnya dalam menangani Bantuan Sosial terhadap masyarakat di Masa Pandemi Covid 19.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

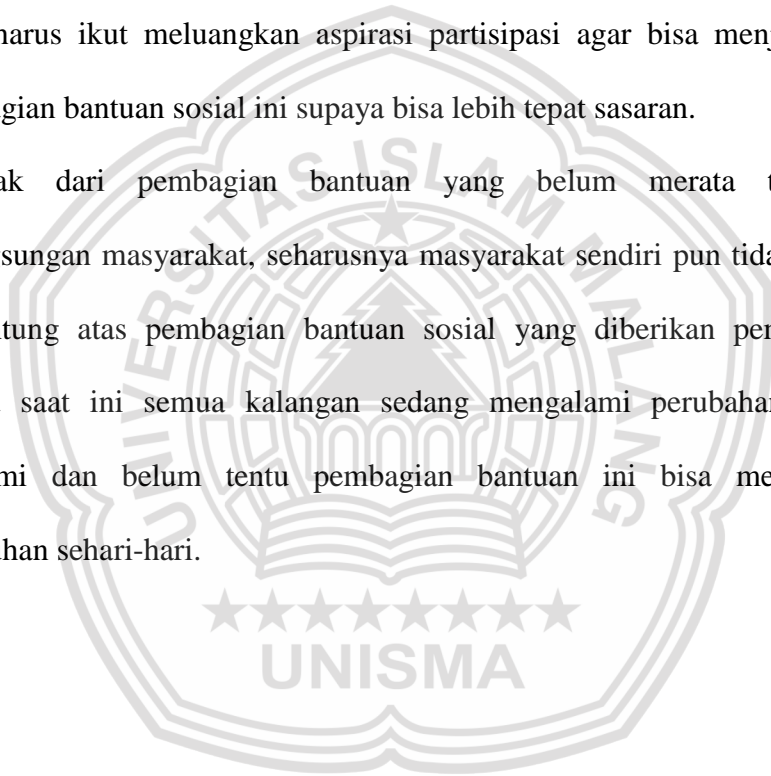
Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Kebijakan pemerintah desa dalam memberikan bantuan kepada warga desa kebangsaan wonorejo telah melakukan pembagian bantuan sosial kepada warga yang terdampak covid 19 sesuai dari pemerintah pusat dan masih belum tepat sasaran.
- b) Pembagian bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo mengalami permasalahan terhadap pembagian bantuan sosial yang belum merata dan pemerintah memberikan peluang partisipasi agar masyarakat tidak terjadi kesalahpahaman atas bantuan sosial pada masa covid 19.
- c) Dampak dari pembagian bantuan yang belum merata terhadap kelangsungan masyarakat mengalami dampak pada perubahan sosial ekonomi yang semakin lemah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam mensejahterakan petani harus dilakukan dengan baik dan optimal, supaya sesuai dengan sasaran. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

- a) Kebijakan pemerintah desa dalam memberikan bantuan kepada warga desa kebangsaan wonorejo harus lebih bisa melakukan pembagian bantuan dengan efektif agar bantuan sosial pada masa pandemi covid 19 bisa di bagikan tepat sasaran.
- b) Pembagian bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo saat ini pemerintah desa melakukan musyawarah bersama perangkat desa dan juga masyarakat yang harus ikut meluangkan aspirasi partisipasi agar bisa menjalankan pembagian bantuan sosial ini supaya bisa lebih tepat sasaran.
- c) Dampak dari pembagian bantuan yang belum merata terhadap kelangsungan masyarakat, seharusnya masyarakat sendiri pun tidak boleh bergantung atas pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah karena saat ini semua kalangan sedang mengalami perubahan sosial ekonomi dan belum tentu pembagian bantuan ini bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Dunn.W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Yogyakarta. GajahMada University.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik, Evaluasi,Revormasi,formulasi*. Malang: Empatdua Media.
- Hesti Puspitosari, Khalikussabir, Luthfi J. Kurniawan..2011. *Filosofi Pelayanan Publik*. Malang. Setara Press
- Moelong, Lexy J.2005. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT . Remaja Rosdakarya
- Moelong, Lexy J.2007. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT . Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexi. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung :PT. Remaja.
- Rahayu, Ani Sri, S.IP., M.AP. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*.Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Sugiyono ,2007. *Metedologi Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono ,2013. *Metedologi Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono ,2015. *Metedologi Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Udin B. sore Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*.Makassar: Cv Sah Media
- Wahab,Solichin Abdul.2005.*Analisis Kebijaksanaan; dari Formalasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Ediisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Jurnal

- Amin Priatna.2008 *Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesihial*. Bandung
- Anisa Mufida.2020.*Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19*. Tangerang. UIN Syarif Hidayatullah.
- Bustami, Alek Wissalam.2020. *Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman..* Jambi. Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

- Enda. 2005, *Miskin*, <http://enda.goblogmedia.com/miskin.html>, dikutip dari Mega Sustra Dewi, *Evaluasi program bantuan langsung tunai (BLT) dikecamatan kramatwatu*, 2016, h. 126
- Ibrahim, Kamaluddin, Mas'ad, Mintasrihadi, Junaidi AM, Arsyad Abd Gani 2020. *Bencana Virus Corona Melalui Sosialisasi Pada Anak Usian Dini pada Desa Rempe Kecamatan Seteluk*.Sumatra Barat.
- Leo Agustino.2020. *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid 19:Pengalaman Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Banten.
- Muhadjir, Noeng.2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*.Raka Sarasin. Yogyakarta
- Pramanik, Nuniek Dewi. 2020. *Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang pada Masa Pandemi Covid-19*. Bandung. Politeknik Piksi Ganesha
- Rapinorrahan.2013. *implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada desa dikecamatan batai alai selatan kabupaten hulu sungai tengah provinsi Kalimantan selatan*. Kalimantan. Universitas Lambung Mangkurat.
- Shofiana, A. (2020). *Implementasi Program Afiliasi Berbasis Virtual Team Dalam UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Pada Masa Pandemi COVID-19* . Pendidikan ekonomi dan bisnis
- Sumarnonugroho T. 1984. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : PT. Hanindita
- Dwi Kiki Wijayanti, Citra Eliyani, Sulistiyani, Krida Puji Rahayu, Siti Aesah. 2020. *Pelatihan dan Bantuan Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Masa Pandemi COVID-19 di RT 003/RW 006, Desa Kabasaran, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor*.Tanggerang Selatan. Universitas Pamulang
- Wilson M.A Therlk. 2020. *Covid 19 dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jawa Tengah. Universitas Kristan Satya Wacana.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

- Peraturan Bupati Situbondo No.23 Tahun 2020 tentang Pedoman penyaluran bantuan sosial dalam rangka penangan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT).

Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial covid-19 dan masalah sosial.

Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

Undang-Undang 1945 Pasal 33 tentang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

